

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA

TAHUN 2025



Dusun I Desa Karang Baru, Kec. Datuk Tanah Datar

www.dishubbatubara.co.id

KATA PENGANTAR

Tahun Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan ini memuat gambaran umum organisasi, perencanaan dan perjanjian kinerja, capaian kinerja utama, realisasi program dan kegiatan, penggunaan anggaran, serta berbagai tantangan dan upaya perbaikan yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara di masa mendatang.

Datuk Tanah Datar, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Batu Bara

Rubi Anto Sari Siboro, ST.,M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19791213 200804 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Isu – Isu Strategis	3
1.4 Keadaan Sarana dan Prasaran	5
1.5 Keuangan.....	7
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	12
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	15
3.3 Realisasi Anggaran.....	30
3.4 Realisasi Pendapatan	43
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan :.....	44
4.2 Saran :.....	45
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2025.....	3
Tabel I. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2025.....	4
Tabel I. 3 Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2025.....	4
Tabel I. 4 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan.....	6
Tabel I. 5 Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	7
Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	10
Tabel II. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
Tabel II. 3 Program-program dan Anggaran.....	11
Tabel III. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	13
Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah.....	15
Tabel III. 3 Jumlah dan Kondisi Rambu di Dinas Perhubungan	20
Tabel III. 4 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	23
Tabel III. 5 Kegiatan Pendukung Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	28
Tabel III. 6 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	30
Tabel III. 7 Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2025.....	32
Tabel III. 8 Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Beroperasinya Bus Gratis Untuk Semua.....	17
Gambar III. 2 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar.....	18
Gambar III. 3 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas.....	19
Gambar III. 4 Pembangunan Halte dan Portal	21
Gambar III. 5 Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas, LPJU dan Lampu Sorot.....	21
Gambar III. 6 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan	22
Gambar III. 7 Rehabilitasi/pemeliharaan Perlengkapan Jalan	23
Gambar III. 8 Presentase Nilai AKIP.....	24
Gambar III. 9 Tampilan Web Dinas Perhubungan.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan
2. Mendorong Dinas Perhubungan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan Peraturan tersebut menyatakan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara terdiri atas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara yang membawahi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
 - c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - d. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
 - e. UPT Terminal
 - f. UPT Perbengkelan Kapal
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara 12 Tahun 2021 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut;
4. Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan Daerah.

1.3 Isu – Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan fasilitas Lalu Lintas
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas
3. Kurangnya Pos Pengaturan dan Pengawasan Jalan
4. Belum adanya penggunaan ITS (Intelligent Transportasi System)
5. Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor Lemah
6. Keterbatasan Data Jalan dan Rambu
7. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Uji Kir

Pegawai pada Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan

Tabel I. 1 Data Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan per Desember Tahun 2025

Nama Jabatan	Jumlah	Satuan
Pejabat Eselon II	1	Orang
Pejabat Eselon III	2	Orang
Pejabat Eselon IV	13	Orang
Jabatan Fungsional	22	Orang
PPPK	2	Orang
PPPK Paruh Waktu	61	Orang
Jumlah	101	Orang

2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Tabel I. 2 Data Pegawai ASN Berdasarkan Golongan per Desember Tahun 2025

Golongan/	Jumlah	Satuan
Golongan IV.b	2	Orang
Golongan IV.a	2	Orang
Golongan III.d	7	Orang
Golongan III.c	7	Orang
Golongan III.b	1	Orang
Golongan III.a	8	Orang
Golongan II.d	1	Orang
Golongan II.c	8	Orang
Golongan II.b	1	Orang
Golongan II.a	1	Orang
Golongan II	48	Orang
Golongan III	15	Orang
Jumlah	101	Orang

3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel I. 3 Data Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan per Desember Tahun 2025

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Satuan
S2	7	Orang
S1	28	Orang
D4	5	Orang
D3	10	Orang
D2	1	Orang
SMA/SMK/MA	50	Orang
Jumlah	101	Orang

Selain jumlah di atas terdapat pula Tenaga Honorer sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 5 orang, SMA 17 orang, dan SMP 2 orang.

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

a) Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten batu bara terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara -21254. Gedung Kantor Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat, dan Bidang Umum Kepegawaian dan Ruang Rapat menempati gedung yang berada di tengah (gedung utama kantor).
2. Ruang kerja Bidang Prasarana dan keselamatan, Aset, Ruang Bidang Keuangan dan Program dan Musholla menempati gedung sebelah kanan gedung utama.
3. Ruang kerja Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan angkutan, Tempat Parkir, Ruang reperasi perlengkapan jalan menempati gedung sebelah kiri gedung utama

b) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. UPT Pengujian kendaraan Bermotor terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
2. UPT Pengujian kendaraan Bermotor terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara.
3. Kantor UPT Terminal terletak di Labuhan Ruku Kecamatan Talawi.

c) Kendaraan Dinas

- 3 1 Unit Mobil Dinas Kepala Dinas
- 4 1 Unit Mobil Dinas Sekretaris Dinas
- 5 1 unit double cabin untuk Operasional Patwal
- 6 1 unit mobil pick-up untuk Pemeliharaan Rambu, Marka dan Lampu Lalu Lintas
- 7 3 Unit bus perintis

- 8 2 Unit Bus Eksekutif yang digunakan untuk Kepentingan – Kepentingan tertentu guna meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan yang menunjang urusan pemerintah Kabupaten Batu Bara
- 9 2 Unit Kendaraan Operasional roda dua yang digunakan untuk pengawalan dan operasi pelayanan di lingkungan Kabupaten Batu Bara

d) Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

Tabel I. 4 Perbandingan Sarana Prasarana dengan Kebutuhan

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi 2025	Keterangan
1.	Ruang Rapat	2	1	
2.	Tempat Parkir	3	2	
3.	Ruang Reparasi Perlengkapan Jalan	1	1	Ruangan tidak memadai dan terlalu sempit
4.	Tempat penyimpanan sapras rambu	1	-	Belum ada ruangan yang khusus untuk penyimpanan
5.	Ruang Dharmawanita	1	1	
6.	Kendaraan roda 4	10	15	Belum ada mobil untuk keperluan operasional sekretariat, belum adanya mobil Crane untuk perbaikan LPJU dan kurangnya jumlah bus perintis
7.	Kendaraan roda 2 patwal	4	2	

1.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.588.900.088 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

Belanja operasi dan Belanja Modal yang berasal dari PAPBD sebesar Rp.20.588.900.088 yang didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan serta 32 sub.kegiatan. Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel I. 5 Anggaran Dinas perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Jenis Belanja / Program	Anggaran DPPA (Rp.)
PENDAPATAN	
BELANJA DAERAH	Rp. 20.588.900.088
BELANJA OPERASI	Rp. 19.433.230.088
BELANJA MODAL	Rp. 1.155.670.000
I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.154.105.209
II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 12.870.717.094
III. Program Pengelola Pelayaran	Rp. 72.400.000

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
 - a) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
 - b) Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
4. Bab IV. Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran, Perjanjian Kinerja, dan Lain-Lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis (renstra) dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi pembangunan kabupaten batu bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu lima tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (rpjmd) kabupaten batu bara tahun 2025- 2030 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rpjmd maupun forum skpd, sehingga renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dengan stakeholder. Selanjutnya, renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tersebut dijabarkan kedalam rencana kerja (renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara untuk periode 1 (satu) tahun. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA					
<p>Nama Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA</p> <p>Melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan</p> <p>a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;</p> <p>b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;</p> <p>c. Pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat, laut dan pelaksanaan pengawasan, pengamanan lalu lintas dan angkutan:</p> <p>Melaksanakan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik, serta</p> <p>d. tempat-tempat pemberhentian, pemberangkatan / terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan Daerah.</p>					
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Konektivitas Darat	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang terhubung dengan angkutan umum darat}}{\text{Total desa/kelurahan}} \times 100$	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Dishub Kabupaten Batu Bara
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	$\frac{\text{Jumlah Komponen Jalan Sesuai Kondisi Ideal}}{\text{Jumlah Komponen Jalan yang Telah Terpasang}} \times 100$	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Dishub Kabupaten Batu Bara
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai Baku yang di peroleh dari LHR	Sekretariat	Inspektorat

Dalam hal pelaksanaan Sasaran Strategis tersebut diatas ditetapkan 3 (tiga) program kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat” dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Pengelola Pelayanan;

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2025 atau disebut perubahan perjanjian kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2025. Yang mana didalamnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja yang diperjanjikan antara kepala Dinas Perhubungan kepada bupati batu bara, antara pejabat eselon III kepada kepala dinas, antara pejabat eselon IV dan ketua tim kepada pejabat eselon III di atasnya. Adapun perencanaan kinerja kepala dinas kepada bupati batu bara pada perubahan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Konektivitas Darat	%	60.92
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	60.32
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,70)

Tabel II. 3 Program-program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.236.105.209	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.870.717.094	PAPBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	72.400.000	PAPBD
	Total	20.588.900.088	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara dalam mencapai tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan mengukur pencapaian sasaran, dibutuhkan tolak ukur atau standar atau sering disebut indikator. Karena tanpa indikator kinerja yang jelas maka kebijakan, program dan kegiatan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan secara baik.

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja in put, out put dan out comes.

Secara umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut

Indikator Kinerja Tahun 2025 yang di tetapkan di ambil melalui Recana Strategis Tahun 2025-2030 Dinas Perhubungan. Sedangkan Realisasi dihitung melalui rumus formula. Data yang diambil untuk menghitung persentase realisasi melalui data kegiatan serta data yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Capaian indikator kinerja organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, dan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 yang telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mana pada Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Konektivitas Darat	%	60.92	60.92	100
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	60.32	57.07	94.55
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,70)	BB (76,70)	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis 1, yaitu Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat, diukur melalui dua indikator kinerja.

Indikator pertama adalah Persentase Konektivitas Darat dengan satuan persen. Pada tahun pelaksanaan, target yang ditetapkan sebesar 60,92% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 60,92%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan

bahwa upaya peningkatan konektivitas jaringan transportasi darat telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Indikator kedua adalah Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal. Target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 60,32%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 57,07%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 94,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kelengkapan jalan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih terhadap target yang ditetapkan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan, maupun kondisi teknis di lapangan.

Selanjutnya, Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, diukur melalui indikator Nilai AKIP. Target yang ditetapkan adalah predikat BB dengan nilai 76,70, dan realisasi yang dicapai juga berada pada predikat BB dengan nilai 76,70. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja dan akuntabilitas keuangan perangkat daerah telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan standar evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara umum, capaian kinerja pada kedua sasaran strategis tersebut berada pada kategori baik hingga sangat baik, yang mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a). Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat

1. Persentase Konektivitas Darat yang diambil dari target jangka menengah yang sudah di sesuaikan ke Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III. 2 Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja				Realisasi	
			2025	2026	2027	2028	2029	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Persentase Konektivitas Darat	58.27	60.92	63.57	66.22	68.87	72.84	100
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	57.35	60.32	65.45	70.55	72.92	81.02	94.55

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat diukur melalui indikator Persentase Konektivitas Darat dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal. Berdasarkan hasil pengukuran, indikator Persentase Konektivitas Darat mencapai target sebesar 60,92% atau 100%, sedangkan indikator Persentase Kelengkapan Jalan terhadap Kondisi Ideal mencapai realisasi sebesar 57,07% dari target 60,32% atau 94,55%.

Faktor pendukung capaian sasaran ini antara lain tersedianya dokumen perencanaan yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, terlaksananya Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara konsisten, serta adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dukungan

sumber daya aparatur turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya capaian indikator kelengkapan jalan antara lain keterbatasan anggaran daerah, luasnya wilayah pelayanan, serta dinamika kondisi jalan yang memerlukan penyesuaian pemasangan perlengkapan lalu lintas. Faktor teknis di lapangan juga mempengaruhi kecepatan dan cakupan pemenuhan kondisi ideal perlengkapan jalan.

Capaian indikator kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Peningkatan Konektivitas Darat. Pada tahun 2025 untuk indikator kinerja ini di dukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

2. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota, Maksud kegiatan ini adalah Beroperasinya Bus Bagus (Bus Gratis Untuk Semua) di daerah yang belum di lalui angkutan umum dan terlaksananya pengumpulan serta analisis data base pelayanan angkutan dan survey lalu lintas guna perencanaan angkutan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan studi pelayanan angkutan dan survey angkutan. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 89.510.000,- dan terealisasi sebesar Rp 88.416.5000,- atau sebesar 98,78%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah Bertambahnya Trayek angkutan dengan bertambahnya desa/kelurahan yang dilalui angkutan Bagus dan tersedianya Laporan data data base angkutan 1 dokumen dan laporan survey Volume Harian Rata -rata (LHR).



Gambar III. 1 Beroperasinya Bus Gratis Untuk Semua

3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Maksud Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota adalah penurunan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan memberikan pelayanan pengamanan lalu lintas. Tujuan kegiatan ini adalah upaya peningkatan Konektivitas darat dengan meningkatkan Kelancaran dan keselamatan berlalu dalam berlalulintas. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan anggaran sebesar Rp 491.546.024,- dan terealisasi sebesar Rp 362.155.712,- atau sebesar 73.68%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yaitu
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, Maksud dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas lalu lintas. Tujuan sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan lalu lintas pada ruas jalan kabupaten pada kondisi normal dan kondisi situasional khususnya pada perayaan natal dan tahun baru serta hari – hari besar lainnya. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 430.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp 306.383.700,- atau sebesar 71.16%, Hal ini disebabkan Tidak terlaksananya kegiatan pemberian Hibah Uang Pos Pengamanan Ops. Lilin Toba.



Gambar III. 2 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengamanan Hari Besar

- b. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Maksud dari sub kegiatan ini adalah perencanaan manajemen rekayasa lalu lintas dengan cara pengamanan lalulintas oleh personil pengatur lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara di persimpangan jalan dan titik – titik berkumpulnya masyarakat seperti tempat perbelanjaan dan kegiatan – kegiatan pimpinan. Tujuan sub kegiatan ini adalah peningkatan keselamatan lalu lintas dan mengurangi titik kemacetan di Kabupaten Batu Bara. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 38.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp 33.770.000,- atau sebesar 87.42%.



Gambar III. 3 Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas

Capaian indikator Persentase Konektivitas Darat yang mencapai 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada ruas-ruas jalan strategis dalam mendukung keterhubungan antarwilayah di Kabupaten Batu Bara.

Sementara itu, capaian indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal sebesar 94,55% menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya mencapai target Renstra/Renja. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan kebutuhan penyesuaian teknis di lapangan, sehingga pemenuhan seluruh perlengkapan jalan sesuai kondisi ideal belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan perlengkapan jalan berdasarkan skala prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Renstra, serta mengoptimalkan penganggaran dalam Renja tahun berikutnya untuk meningkatkan capaian indikator tersebut.

Tabel III. 3 Jumlah dan Kondisi Rambu di Dinas Perhubungan

NO	NAMA RAMBU	KEADAAN RAMBU				
		JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	HILANG
1	Total Rambu dan Deliniator Kabupaten Batu Bara	1388	675	270	143	300
2	Total RRPJ tiang pendek	14	5	3	6	
3	Total RRPJ tiang tinggi	57	30	10	17	
4	Total Papan Himbauan	22	2	19		1
5	Total Halte	18	10	8		
6	Total Warning Light	16	10	6		
7	Total LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) dan Lampu Sorot	2317	1450		867	
8	Total Traffic Light	4		4		
7	Total Portal	21	18	3		
TOTAL KESELURUHAN RAMBU.....		3857	2200	323	1033	301
Total Kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ Lainnya dari Tahun 2024 s/d 2028 sebanyak		5.000		unit		
Total sisa kebutuhan rambu rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ lainnya dari tahun 2024 s/d 2028 sebanyak		1.143		unit		

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah pembangunan Halte dan Portal. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 138.504.751,- dan terealisasi Rp 136.408.751,- atau sebesar 98,49%. Pembangunan Prasarana Jalan pada sub kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Jumlah Halte 1 unit
 - b. Jumlah Portal 2 Pasang



Gambar III. 4 Pembangunan Halte dan Portal

2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas, LPJU dan Lampu Sorot. Anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp 972.550.000,- dan terealisasi Rp 957.563.506,- atau sebesar 98,46%. Pemasangan perlengkapan jalan pada sub kegiatan ini terdiri dari :
 - a. Jumlah Rambu – Rambu Lalu Lintas 35 unit
 - b. Jumlah LPJU 88 unit
 - c. Jumlah Lampu Sorot 2 unit



Gambar III. 5 Penyediaan Rambu – rambu lalu lintas, LPJU dan Lampu Sorot

3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Prasarana jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya Halte di Kabupaten Batu Bara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 12.700.000,- terealisasi sebesar Rp 12.400.000,- atau sebesar 97.64%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan 3 unit Halte.



Gambar III. 6 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Jalan

4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Maksud subkegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Jalan jalan agar berfungsi dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah terpeliharanya Halte, LPJU dan Rambu – rambu lalu lintas dan terbayarnya biaya listrik LPJU di Kabupaten Batu Bara. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 11.398.875.979,- terealisasi sebesar Rp 11.006.580.688,- atau sebesar 96.56%. Hasil dari kegiatan ini adalah rehabilitasi/ pemeliharaan 2 unit Halte,155 unit LPJU dan 10 Unit Rambu – rambu lalu lintas .



Gambar III. 7 Rehabilitasi/pemeliharaan Perlengkapan Jalan

b). Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

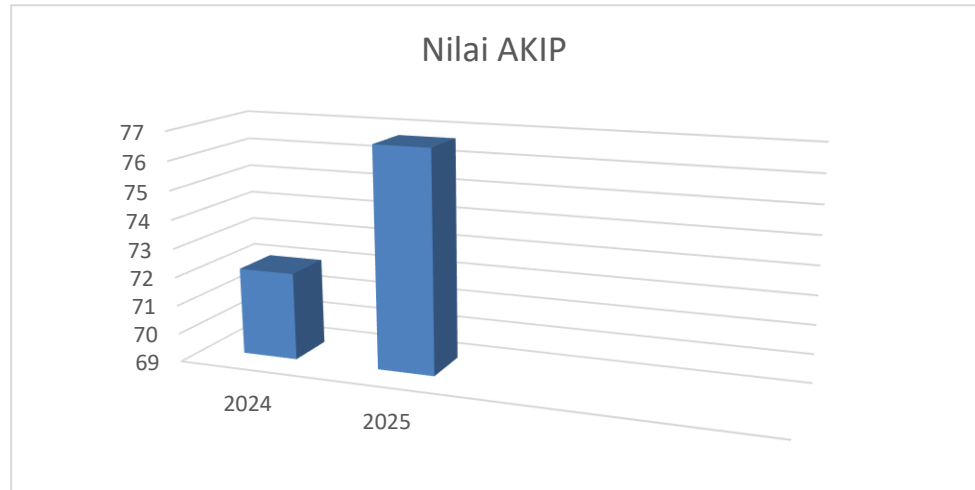
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, yang diambil dari target jangka menengah yang sudah di sesuaikan ke Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III. 4 Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Realisasi	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)
1	Nilai AKIP	BB (72.06)	BB (75.00)	BB (76.70)	BB (77.00)	BB (78.00)	A (80.00)	BB (76.70)	100

Capaian indikator Nilai AKIP dengan predikat BB (76,70) atau 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program penunjang telah mendukung keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Renstra dan Renja. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan kinerja perangkat daerah telah berjalan secara konsisten dan akuntabel. Meskipun demikian, untuk

mendukung peningkatan nilai AKIP pada periode Renstra selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu terus memperkuat kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), sebagaimana menjadi fokus dalam kebijakan perencanaan perangkat daerah.



Gambar III. 8 Presentase Nilai AKIP

Nilai AKIP Dinas Perhubungan diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan yang di evaluasi oleh tim Inspektorat kabupaten Batu Bara tahun 2025. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara tahun 2025 menunjukkan kategori BB(Baik Sekali) dengan nilai sebesar 76.70 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 30,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 24,9 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja dengan kriteria baik yang berorientasi hasil (Outcome) dan selaras dengan RPD kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026 dan telah membuat Rencana Aksi untuk mencapai target kinerja yang telah dijanjikan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025;
2. Pengukuran Kinerja bobot 30,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 25,6 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pengukuran kinerja secara formal untuk penilaian kinerja;

3. Pelaporan Kinerja bobot 15,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 10,50 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah menyusun Laporan Kinerja dan disampaikan tepat waktu dan sudah menyajikan informasi mengenai pencapaian, IKU dinas, pencapaian sasaran yang berorientasi outcome sesuai yang disajikan serta terdapat evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot 25,00 nilai Akuntabilitas Kinerja 15,70 dimana Dinas Perhubungan kabupaten Batu Bara telah melakukan evaluasi internal mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya namun hasil evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim penilai AKIP,

Masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja, Renja dan Renstra belum di publikasikan; pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan telah mengaktifkan kembali website Dinas Perpustakaan dan telah mempublikasikan dokumen dokumen yang berkaitan dengan Perpustakaan seperti Renja dan Renstra; dapat dibuktikan melalui gambar di bawah ini;



Gambar III. 9 Tampilan Web Dinas Perhubungan

2. Pengukuran Kinerja, Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; Dinas Perhubungan akan mengimplementasikan Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsionalPelaporan Kinerja
3. Laporan kinerja belum dipublikasikan; pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah mengaktifkan kembali website Dinas Perhubungan dan telah mempublikasikan dokumen dokumen yang berkaitan dengan Perpustakaan salah satunya yakni Laporan Kinerja; dapat dibuktikan melalui gambar di bawah ini;
4. Masih kurangnya informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam menajpai kinerja dalam laporan kinerja; pada Laporan kinerja tahun 2025 Menginformasikan ada/tidak realisasi kinerja skala nasional/internasional pada Dinas Perhubungan
5. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahu sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti; Menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut.

Kemudian untuk mewujudkan kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” dicapai melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Yang mana melalui program dan kegiatan tersebut dilaksanakan beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian outcome yang direncanakan bahwa untuk meningkatkan nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu dipenuhi dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan OPD antara lain sebagai berikut:

- Standart Operasional Prosedur (SOP)
- Pohon Kinerja/ cascading kinerja dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV;
- Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan RPJMD dan IKU;

- Rencana Kerja (Renja);
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD;
- Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan tingkat eselon IV dan Ketua tim;
- Rencana Aksi dan laporan evaluasi kinerja triwulanan;
- Risk Register Dinas Perhubungan berserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tabel III. 5 Kegiatan Pendukung Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan yang Tersedia	100,00	%	26.720.000	100	%	26.720.000	100	%	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%	3.908.589.510	100	%	3.857.021.411	100	%	99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100	%	219.881.000	100	%	193.028.600	100	%	88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	276.523.799	100	%	267.833.828	100	%	97
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	12	Unit	149.200.000	12	Unit	148.042.920	100	%	99

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.271.509.900	100	%	2.165.969.135	100	%	95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	383.681.000	100	%	368.346.965	100	%	96
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	100	%	72.400.000	100	%	72.345.200	100	%	100
				7.308.505.209			7.099.308.059			

Kemudian dalam rangka perbaikan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah” pada masa mendatang, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara perlu melakukan tindaklanjut sebagai berikut;

1. Menyusun dokumen basis data sebagai acuan perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara kedepan yang Update;
2. Menggunakan IKU terbaru sesuai dengan peraruran bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja selanjutnya. Dan itu telah dimulai pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan dijadikan acuan pengukuran pada Laporan Kinerja Tahun 2025;
3. Memperbaiki cara penyajian laporan kinerja tahun 2025 dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan mengikuti kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.3 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN	Rp. 300.000.000,00,-	Rp.147.900.000,00	49.30
BELANJA DAERAH			
Belanja Operasi	Rp. 19.433.230.088,00,-	Rp.18.692.771.915,00-	96.19
Belanja Modal	Rp. 1.155.670.000,00-	Rp.1.137.203.926,00-	98.40
Jumlah	Rp. 20.588.900.088,00-	Rp 19.829.975.841,00-	92.39

Penyerapan anggaran belanja Operasi pada tahun 2025 sebesar 92.39% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 7 Anggaran dan realisasi belanja Operasi dan belanja modal tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip	76,70	%	7.236.105.209	76,70	%	7.026.962.859	100	%	97
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Kinerja Dan Keuangan Yang Tersedia	100,00	%	26.720.000	100	%	26.720.000	100	%	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	14.710.000	4	Dokumen	14.710.000	100	%	100
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	4	Laporan	12.010.000	4	Laporan	12.010.000	100	%	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100	%	3.908.589.510	100	%	3.857.021.411	100	%	99
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	38	Orang/Bulan	3.886.809.510	38	Orang/Bulan	3.835.241.411	100	%	99

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Laporan	13.590.000	2	Laporan	13.590.000	100	%	100
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd Dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	18	Laporan	8.190.000	18	Laporan	8.190.000	100	%	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100	%	219.881.000	100	%	193.028.600	100	%	88
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	150.700.000	2	Paket	149.028.600	100	%	99
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	9	Orang	69.181.000	8	Orang	44.000.000	89	%	64

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	276.523.799	100	%	267.833.828	100	%	97
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Terpenuhi	4	Paket	40.423.545	4	Paket	40.285.897	100	%	100
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapandan Peralatan Kantor Yang Disediakan	4	Paket	43.231.254	4	Paket	43.158.130	100	%	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	Paket	46.550.000	12	Paket	39.520.000	100	%	85
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	4	Paket	36.339.000	4	Paket	36.311.124	100	%	100
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12	Dokumen	36.000.000	12	Dokumen	36.000.000	100	%	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	12	Laporan	73.980.000	12	Laporan	72.558.677	100	%	98

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	12	Unit	149.200.000	12	Unit	148.042.920	100	%	99
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	1	Unit	67.200.000	1	Unit	67.099.500	100	%	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2	Paket	54.000.000	2	0%	53.859.420	100	%	100
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	3	Unit	28.000.000	3	Unit	27.084.000	100	%	97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2.271.509.900	100	%	2.165.969.135	100	%	95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	9.000.000	2	Laporan	9.000.000	100	%	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	Laporan	99.759.500	12	Laporan	94.451.336	100	%	95

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerj a		Rp.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	Laporan	2.162.750.400	12	Laporan	2.062.517.799	100	%	95
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	383.681.000	100	%	368.346.965	100	%	96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	54.602.000	1	Unit	47.943.665	100	%	88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinanya	9	Unit	266.620.000	9	Unit	259.243.300	100	%	97
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	46	Unit	38.690.000	42	Unit	38.660.000	91	%	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerj a		Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Terpeihara/Direhabilitasi	1	Unit	23.769.000	1	Gedung	22.500.000	100	%	95
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Konektivitas Darat	60,92	%	13.280.394.879	60,92	%	12.730.667.782	100	%	95
	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	60,32	%		57,03	%		95	%	
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	100	%	12.522.630.730	100	%	12.112.952.945	100	%	97
Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Yang Terbangun	3	Unit	138.504.751	3	Unit	136.408.751	100	%	98
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten Yang Tersedia	125	Unit	972.550.000	125	Unit	957.563.506	100	%	98
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	3	Unit	12.700.000	3	Unit	12.400.000	100	%	98

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara	155	Unit	11.398.875.979	155	Unit	11.006.580.688	100	%	97
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	%	63.275.500	100	%	55.430.000	100	%	88
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Terbangunya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten	12	Laporan	63.275.500	12	Laporan	55.430.000	100	%	88
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	%	85.000.000	100	%	83.415.000	100	%	98
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Tersedia	2	Unit	30.000.000	2	Unit	29.415.000	100	%	98

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerj a		Rp.
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000	Dokumen	25.000.000	1000	Dokumen	25.000.000	100	%	100
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara	10	Unit	30.000.000	10	Unit	29.000.000	100	%	97
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Yang Terlaksana	100	%	491.546.024	100	%	362.155.712	100	%	74
Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	430.550.000	6	Laporan	306.383.700	100	%	71
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten	4	Laporan	22.366.024	4	Laporan	22.002.012	100	%	98

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.
Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan	38.630.000	4	Laporan	33.770.000	100	%	87
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Rekomendasi Andalalin	100	%	28.432.625	100	%	28.297.625	100	%	100
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4	Laporan	6.975.000	4	Laporan	6.930.000	100	%	99
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin Yang Terawasi	4	Laporan	11.196.750	4	Laporan	11.151.750	100	%	100
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin Yang Ditetapkan	2	Dokumen	10.260.875	2	Dokumen	10.215.875	100	%	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target			Realisasi			%		
		Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.	Kinerj a		Rp.
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	100	%	89.510.000	100	%	88.416.500	100	%	99
Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	89.510.000	12	Laporan	88.416.500	100	%	99
Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	41,00	%	72.400.000	41,00	%	72.345.200	100	%	100
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Di	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	100	%	72.400.000	100	%	72.345.200	100	%	100

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/ Output)	Target		Realisasi		%				
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja		Rp.		
Daerah Kabupaten/Kota										
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten	12	Laporan	72.400.000	12	Laporan	72.345.200	100	%	100
				20.588.900.088			19.829.975.841			96,31

3.4 Realisasi Pendapatan

Salah satu penggerak keuangan daerah adalah daerah yang bersangkutan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, ketentuan perundang-undangan menetapkan pokok-pokok kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lainnya.

Kebijakan umum pendapatan daerah untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang prima diutamakan prinsip partisipasi yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan melalui proses temu publik, dialog dan konsultan.

Adapun Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara target PAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 8 Rekapitulasi PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara

No	PAD Dinas Perhubungan	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	147.900.000
Total		147.900.000

Adapun permasalahan secara umum dalam Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara adalah :

- Kurangnya Pengawasan dari Petugas dan adanya pemungutan parkir liar oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.
- Tingginya Target yang di tetapkan tanpa mempertimbangkan titik parkir yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan yang dicapai Dinas Perhubungan berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1 Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja perangkat daerah telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Sasaran Strategis 1, yaitu Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat, indikator Persentase Konektivitas Darat menunjukkan capaian kinerja yang optimal dengan realisasi sebesar 60,92% dari target 60,92% atau tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan konektivitas jaringan transportasi darat telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan.

Sementara itu, indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal mencapai realisasi sebesar 57,07% dari target 60,32%, dengan tingkat capaian sebesar 94,55%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kelengkapan jalan telah berjalan dengan baik, meskipun masih memerlukan peningkatan secara bertahap agar dapat mencapai kondisi ideal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, indikator Nilai AKIP mencapai target dengan predikat BB (76,70) atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah telah dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara telah mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan, penganggaran, serta peningkatan kualitas pelaksanaan

program dan kegiatan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.

4.2 Saran :

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program pada Renja tahun berikutnya agar lebih selaras dengan target Renstra.
2. Menetapkan skala prioritas pemenuhan kelengkapan jalan berdasarkan tingkat urgensi dan risiko keselamatan.
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penerapan SAKIP dan penyusunan indikator kinerja berbasis hasil (outcome).
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target kinerja.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA**
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.**
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025



Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**

RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19791213 200804 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Persentase Konektivitas Darat	%	60,92
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	60,32
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (76,70)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.236.105.209	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.280.394.879	PAPBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	72.400.000	PAPBD
JUMLAH		20.588.900.088	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025



Pihak Kedua,
BUPATI BATU BARA

H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si.

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**



RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19791213 200804 1 001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONI IRAWAN, S.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RUBI ANTO SARI SIBORO, ST., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

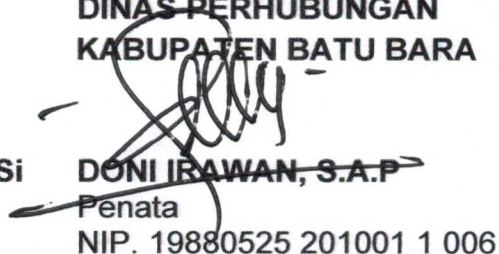
Datuk Tanah Datar, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**



RUBI ANTO SARI SIBORO, ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791213 200804 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PRASARANA
DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**



DONI IRAWAN, S.A.P
Penata
NIP. 19880525 201001 1 006

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	57,35

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGITAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.551.063.355	PAPBD
JUMLAH		12.551.063.355	

Datuk Tanah Datar, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**



RUBI ANTO SARI SIBORO, ST., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19791213 200804 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PRASARANA
DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**



DONI IRAWAN, S.A.P
Penata
NIP. 19880525 201001 1 006



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTINA R. NAINGGOLAN, S.Kom**
Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RUBI ANTO SARI SIBORO, ST., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Datuk Tanah Datar, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**

RUBI ANTO SARI SIBORO, ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791213 200804 1 001

Pihak Pertama

**KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**

AGUSTINA R. NAINGGOLAN, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820817 200502 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEGAWAI
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BATU BARA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat)	Persentase Konektivitas Darat	%	58,27

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGITAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	644.331.524	PAPBD
JUMLAH		644.331.524	

Datuk Tanah Datar, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**


RUBIANTO SARI SIBORO, ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19791213 200804 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BATU BARA**


AGUSTINA R. NAINGGOLAN, S.Kom
Penata Tk. I
NIP. 19820817 200502 2 003